

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK
(Studi Empiris pada UMKM di Kota Ambon)**

Andi Agung

Alumni Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Belianus Patria Latuheru

Grace Persulessy

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

***Abstract;** This study aims to analyze Factors Affecting the Implementation of Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability (SAK ETAP) on MSME in Ambon City, Moluccas Province. Testing of Owner Education, Understanding of Information Technology, Characteristic of Financial Statement, Socialization and Training of Implementation of Financial Accounting Standard Entity Without Public Accountability (SAK ETAP) use survey conducted by direct Respondent.*

The data collected in this study using Slovin method by determining the number of samples based on the formula. The sample in this research are 61 respondents who are MSME in various industry in Ambon City. The data of this study were tested using Multiple Regression Analysis with 5% significance

Level of the results of this study can provide evidence that the Owner's Education, Information Technology Understanding, Socialization and Training have no significant effect on the Application of SAK ETAP while Qualitative Characteristics of Financial Statement significantly influence the application of SAK ETAP

***Keywords:** Owner Education, Understanding Information Technology, Qualitative Characteristics of Financial Statements, Socialization and Training, Implementation of SAK ETAP, Micro Small and Medium Enterprises*

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan benteng dalam perekonomian Indonesia. Khususnya keterkaitan antara perkembangan UMKM dengan perekonomian di Indonesia, data yang dilansir dari Kementrian Negara Koperasi dan

UMKM menunjukkan di Indonesia dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan sumbangsih UMKM terhadap PDB nasional.

Modal utama pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Kedudukannya sebagai pemain utama dan tulang punggung dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyediaan lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pembangunan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Itu telah terbukti ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (Bank Indonesia 2015).

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi masa krisis tidak serta merta menjadikan UMKM mampu menjaga kelangsungan usahanya dengan baik. Banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM, seperti aspek keuangan, sumber daya manusia (SDM), iklim usaha, infrastruktur dan pemasaran. Sehingga walaupun memiliki peran yang strategis bagi ekonomi namun upaya pengembangan sektor UMKM juga bukanlah hal yang mudah (Bank Indonesia 2015).

Belum adanya kesamaan *mindset* antara persyaratan bank yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk ketersediaan laporan keuangan dan *bussines plan* (rencana pengembangan usaha) merupakan kendala yang menyebabkan minimnya akses keuangan UMKM. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis. Laporan keuangan berguna bagi pemilik untuk dapat memperhitungkan keuangan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya didasarkan pada kondisi kongkrit keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata.

Pemerintah Indonesia, membina UMKM melalui Dinas Koperasi dan UMKM, di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota. Namun kenyataan UMKM di Indonesia tidak semulus yang dibayangkan. Permasalahan yang terjadi selama ini banyak UMKM yang gulung tikar. Salah satu faktornya adalah tidak konsistennya dalam menggunakan pembukuan keuangan, seperti misalnya ketika mendapat pinjaman modal dari bank ternyata arahnya tidak untuk usaha tetapi untuk kebutuhan lain, atau tanpa perhitungan mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi, dan lain-lain. Ddalam usaha ini juga perlu untuk melakukan pengelolaan keuangan, semua harus ada hitungnya, yang mana uang untuk usaha, mana uang untuk pribadi dan mana uang untuk kegiatan sosial.

Memang disadari bahwa disiplin melakukan pembukuan belum membudaya di Indonesia. Masih sedikitnya UMKM yang melakukan pembukuan secara formal disebabkan oleh beberapa faktor. Ada terdapat dua faktor yang menjelaskan mengapa hal terjadi. Pertama, terbatasnya *skill* manajemen dari pelaku UMKM khususnya mengenai aspek pembukuan dan akuntansi. Dan yang kedua, biaya masih terlalu tinggi untuk menyelenggarakan sistem pembukuan yang standar didasarkan (Rohman, 2011).

Banyak UMKM yang belum sadar akan pentingnya pencatatan akuntansi atau laporan keuangan dalam usahanya, karena terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya. Terlebih lagi bentuk UMKM yang lebih didominasi perusahaan perseorangan mengakibatkan kurangnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Bentuk perseorangan juga menyebabkan pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha, dengan kegiatan usahanya sering kali juga tidak dilakukan. Akibatnya, terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti perkembangan usahanya. Hanya perusahaan besar, atau yang telah masuk ke Bursa Efek (*go publik*) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik.

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan dengan menetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Dalam pasal 48 menyatakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan kesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, pada pasal 49 ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha.

Saat ini sebagian UMKM telah mulai menyusun laporan keuangan meskipun terbatas untuk memenuhi persyaratan kredit ataupun dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan sendiri memerlukan keterampilan dan pengetahuan mengenai pembukuan akuntansi. Hal ini masih sulit dilakukan karena keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009, dalam Rudiantoro dan Siregar, 2012).

Terkait dengan hal ini, untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan pentingnya standarisasi laporan keuangan yang lebih sederhana. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada Tanggal 19 Mei 2009 telah mengesahkan Standar Akuntansi Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) khusus bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu salah satunya (UMKM) dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2011.

Penerapan SAK ETAP perlu dipersiapkan oleh pelaku UMKM namun juga oleh pemerintah, pihak penyalur kredit dan lembaga akuntansi secara bersama-sama. Pihak pemerintah juga harus berperan untuk mensosialisasikan standar yang baru kepada UMKM, memberikan pelatihan dasar akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP bagi pelaku UMKM dan membuat program pendukung lainnya.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan SAK ETAP secara keseluruhan, peran sosialisasi atau pelatihan bagi UMKM sangat diperlukan agar mengetahui dan memahami tujuan dan cara penerapan standar. Umumnya proses sosialisasi yang dilakukan IAI meliputi publikasi penetapan dan pengesahan SAK ETAP melalui berbagai media cetak dan sarana komunikasi lainnya, yakni dengan penerbitan buku SAK yang dijual dan disebarluaskan kepada publik, penyelenggaraan berbagai pelatihan, kursus dan seminar bagi pengguna SAK ETAP maupun pihak lain yang berkepentingan.

Sejak saat pengesahan SAK ETAP hingga saat ini, diselenggarakan berbagai pelatihan mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang ditujukan kepada pelaku UMKM maupun akademisi. Sosialisasi dan pelatihan juga dilakukan oleh Pemerintah, perusahaan swasta, dan juga perguruan tinggi negeri, misalnya Dinas Koperasi dan UMKM menjadikan program pelatihan akuntansi sebagai salah satu program kerja tahunan.

Tabel 1
Jumlah UMKM di kota Ambon tahun 2016

No	Uraian	Jumlah	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Tenaga Kerja
1	Industri pangan	94	19.474.650	35.037.874	714
2	Industri sedang	19	334.750	769.250	92
3	Industri kimia dan bahan bangunan	49	5.166.620	11.733.220	227
4	Industri logam dan elektronika	67	5.184.705	10.890.952	268
5	Industri kerajinan	34	2.402.500	4.535.000	217
Jumlah		263	32.563.225	62.966.296	1.518

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Tahun 2016.

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan penghasil tenaga kerja terbanyak dimana ada 1.518 orang di berbagai industri di kota Ambon. Dengan nilai investasi sebesar Rp.32.563.223,00 sangat disayangkan jika industri industri

diwaktu yang akan datang mengalami kebangkrutan akibat dari tidak ada ketersediaan laporan keuangan dimana laporan keuangan merupakan inti dari kesuksesan sebuah perusahaan. Karena dari laporan keuangan perusahaan dapat menilai kelebihan dan kekurangan perusahaan sehingga dapat membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan dari perusahaan itu sendiri.

Dalam menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik perlu didukung faktor-faktor yang memadai, sehingga penerapan standar akuntansi itu diterapkan sesuai standar yang berlaku. Adapun faktor-faktor itu adalah pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta sosialisasi dan pelatihan.

Pendidikan adalah proses yang terus menerus dari penyesuaian yang lebih dari makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental. Pendidikan merupakan faktor yang terpenting dalam mensukseskan sebuah perusahaan dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki (M.J. Langeveld). Di kota Ambon sendiri rata rata tingkat pendidikan pemilik UMKM adalah SMA. dikarenakan berdirinya sebuah UMKM bukan berdasarkan latar belakang pendidikan melainkan modal yang dimiliki.

Pemahaman teknologi informasi merupakan inovasi baru yang memiliki perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. UMKM harus menyadari bahwa teknologi informasi harus dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk memecahkan permasalahan dan langkah dalam meraih kesempatan serta memenuhi keinginan yang ingin dicapai. Peran teknologi informasi dalam membantu dunia akuntansi sudah berlangsung lama. Alasannya adalah efisiensi waktu dan biaya yang diperhitungkan. Alasan lain termasuk peningkatan efektifitas, mencapai hasil/output laporan keuangan dengan benar. Alasan lainnya yaitu ditambah dengan perlindungan atas aset perusahaan (Williams dan Sawyer. 2003). Di kota Ambon dengan adanya pemahaman tentang teknologi informasi sangat diharapkan sehingga perkembangan UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dan dapat memenuhi kebutuhan penggunaanya, laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik dimana laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang baik UMKM di kota Ambon harus memenuhi karakteristik laporan keuangan.

Sosialisasi dan pelatihan merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekarang dan yang akan datang dengan meningkatkan kemampuan. Perlunya sosialisasi dan pelatihan pada UMKM di kota Ambon sehingga dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan terhadap UMKM diharapkan mampu menambah pemahaman sehingga perkembangan usaha UMKM di kota Ambon terus meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan adanya sosialisasi dan pelatihan yang diadakan secara rutin.

Untuk wilayah kota Ambon sendiri dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa pemilik UMKM bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan SAK ETAP dalam sistim pencatatan dan pembukuan. Beberapa UMKM memang membuat sistim pencatatan tetapi hanya berfokus pada pemasukan dan pengeluaran yang dialami oleh UMKM itu sendiri. dan sebahagian besar UMKM di kota Ambon melakukan hal yang sama. Dan ini merupakan sebuah masalah yang sangat bertolak belakang dengan adanya peraturan yang mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang ditujukan khusus bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang salah satunya adalah UMKM yang telah berlaku.

UMKM bagi perekonomian Nasional harus didukung akses keuangan yang baik agar industri tersebut semakin berkembang. Kurangnya akses pelayanan keuangan yang rendah dapat menghambat perkembangan UMKM di Indonesia. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan UMKM untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yang tertuang dalam PPRI No 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dimana ditegaskan bahwa setiap UMKM wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha. Hal ini masih sulit dilakukan dikarenakan keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM. Dengan adanya kondisi seperti ini untuk mempermudah UMKM menyusun laporan keuangan dan pentingnya standarisasi laporan keuangan yang lebih sederhana. IAI melalui Dewan Standar Akuntansi (DSAK) mengesahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada 19 Mei 2009. Dengan adanya SAK ETAP diharapkan mampu memberikan kemudahan pada UMKM untuk menyusun laporan keuangannya dan menyelesaikan masalah internal perusahaannya. Namun penerapan standar akuntansi pada UMKM di kota Ambon masih sulit untuk dilakukan dikarenakan kurangnya kesadaran para pelaku UMKM terhadap pencatatan yang mengakibatkan tidak tersedianya informasi kondisi perusahaan. Dan mungkin ada faktor-faktor internal maupun eksternal yang belum memadai sehingga muncullah masalah seperti ini.

Mencermati uraian di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan pemilik UMKM terhadap penerapan SAK ETAP,

pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penerapan SAK ETAP, pengaruh karakteristik laporan keuangan terhadap penerapan SAK ETAP, pengaruh sosialisasi dan pelatihan terhadap penerapan SAK ETAP.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang disusun sebagai acuan dan dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Menurut buku SAK ETAP (2009:1) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pengusaha yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Walaupun demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP, contohnya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/37//DKBU tanggal 31 Desember 2009. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek (*listed company*), bank, perusahaan asuransi, pialang, atau pedagang efek, entitas dana pensiun, perusahaan reksa dana, dan BUMN bukan merupakan entitas yang memakai SAK ETAP (Ahalik, 2015:17). Ini juga jelas mengandung makna bahwa entitas kecil dan menengah yang dimaksud oleh SAK ETAP adalah entitas kecil menengah *non-listed* atau entitas yang tidak masuk dalam bursa saham. Artinya ada dua standar akuntansi yang berbeda yang

dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Ini berarti juga akan ada standar pengukuran dan pengungkapan yang berbeda dari masing-masing standar akuntansi tersebut. Disatu sisi ada SAK ETAP yang khusus ditujukan untuk entitas kecil menengah yang *non-listed*, disisi lain ada SAK umum, dalam hal ini PSAK yang ditujukan untuk entitas lainnya, termasuk entitas kecil menengah jika entitas tersebut termasuk *listed company*. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas nantinya harus menyebutkan bahwa laporan keuangan tersebut telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan, apakah SAK ETAP atau PSAK.

Laporan Keuangan SAK ETAP

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK (2007:7), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan SAK ETAP (IAI, 2009) itu sendiri neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu atau akhir periode pelaporan. Neraca minimal mencakup pos-pos: kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban kewajiban diestimasi, ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan neraca sebagai laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yaitu aktiva kewajiban, dan ekuitas. Neraca mengungkapkan informasi mengenai jumlah dan informasi lainnya tentang sumber daya perusahaan, kewajiban pada kreditur, dan ekuitas pemilik yang dimiliki perusahaan sampai dengan tanggal pelaporan neraca tersebut.

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP (IAI, 2009: 23) menyatakan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi

neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Selain itu entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian laporan laba rugi sebagai laporan kinerja yang mengungkapkan kesuksesan hasil operasi perusahaan pada suatu periode tertentu.

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan pengaruh laba rugi tahun berjalan serta penggunaannya, dan penambahan atau pengurangan modal pemilik (Samryn, 2011). Laporan laba rugi menyajikan laba atau rugi entitas untuk periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan deviden dan distribusi lain ke pengusaha ekuitas selama periode tersebut. (IAI, 2009: 26). Dengan demikian laporan perubahan ekuitas sebagai laporan yang menunjukkan rekonsiliasi saldo awal ekuitas hingga menunjukkan saldo akhir ekuitas. Rekonsiliasi tersebut berasal dari tambahan investasi, laba rugi usaha, dan pendistribusian hasil untuk pemilik (*dividend atau drawing*).

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi (IAI, 2009: 27).

Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (IAI, 2009:28). Laporan arus kas sebagai laporan yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. (IAI, 2009:30)

Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang

berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi (IAI, 2009: 31)

Penerapan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Kehadiran SAK ETAP dengan prinsip kesederhanaan seharusnya dapat memudahkan UMKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP diharapkan dapat memberi kebebasan dalam berbisnis, kebebasan berinvestasi, dan membangun ekonomi kerakyatan berbasis UMKM bagi Indonesia. Apabila SAK ETAP diterapkan dengan baik, pihak UMKM akan terbantu dalam menyusun laporan keuangan baku yang merupakan bahan pertimbangan atau mata rantai dalam proses pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan pelaku bisnis, sekaligus berfungsi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dari manajemen dalam menjalankan usahanya secara profesional. Dengan diterapkannya SAK ETAP dalam perusahaan, UMKM tentu akan memiliki data (keterangan) akurat yang tentunya sangat berguna bagi pelaku UMKM dalam upaya lebih meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi usaha.

Dalam kata pengantar di SAK ETAP oleh Dewan Pengurus Nasional IAI menyatakan bahwa SAK ETAP, bukan SAK UKM, bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada PSAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UKM, bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan, dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun (Ahalik, 2015:18).

Studi terhadap penerapan SAK memberikan bukti bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan memberatkan bagi UKM (Wahdini & Suhairi, 2006). Dalam penelitian Wahdini dan Suhairi (2006) studi yang sama juga pernah dilakukan di beberapa negara, dan menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan memberatkan bagi UKM (Williams, Chen, & Tearney, 1989; Knutson & Hendry, 1985).

Sekalipun memberatkan, penelitian tentang jenis informasi akuntansi yang disajikan dan digunakan oleh perusahaan kecil di Australia mengungkapkan bahwa informasi akuntansi utama yang banyak disiapkan dan digunakan perusahaan kecil adalah informasi yang diharuskan menurut undang-undang (*statutory*), yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (Homes & Nicholls, 1989).

Standar akuntansi keuangan tidak lepas dari perihal informasi akuntansi, dimana standar keuangan merupakan tata cara formal yang berlaku sebagai acuan penyusunan laporan keuangan. Belkaoui (2000) mendefinisikan informasi akuntansi

sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan.

Kekurangan informasi akuntansi dalam manajemen perusahaan dapat membahayakan perusahaan kecil. Kondisi keuangan yang memburuk dan kekurangan catatan akuntansi akan membatasi akses untuk memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga akan menyebabkan kegagalan perusahaan (Haswell dan Holmes, 1989; dalam Astuti, 2007).

Tarmizi (2013) mengukur penerapan SAK ETAP menggunakan tiga indikator, yaitu akuntabilitas, tujuan dan kelengkapan informasi sesuai SAK ETAP. Menurut Eni Minarni (2014) implementasi SAK ETAP dapat diukur dengan tujuh indikator terkait pemahaman pengukuran, pengungkapan dan penyajian akun-akun yang tercantum dalam SAK ETAP, yaitu: (1) penyajian laporan keuangan dengan menghilangkan pos-pos yang diatur dalam SAK-ETAP, (2) Proses penyajian laporan laba/rugi tanpa harus menyajikan laba/rugi komprehensif, (3) Proses pengungkapan modal, (4) Proses penyajian arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, (5) proses pengukuran properti investasi dengan menggunakan biaya, (6) proses pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud, (7) pembebanan biaya pinjaman langsung dibebankan.

Sedangkan Supadmi (2015) mengukur implementasi SAK ETAP dengan 6 indikator yang diadopsi dari pedoman SAK ETAP yang disusun oleh IAI tahun 2009, yaitu: (1) Mengakui semua aset dan kewajiban sesuai SAK ETAP, (2) Tidak mengakui aset dan kewajiban jika tidak diijinkan oleh SAK ETAP, (3) Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan SAK yang berlaku umum menjadi SAK ETAP, (4) Menerapkan pengukuran aset dan kewajiban yang diakui sesuai SAK ETAP, (5) SAK ETAP membantu pengontrolan masuk dan keluar keuangan perusahaan, (6) SAK ETAP memberi kemudahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan.

SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, salah satunya ialah UMKM. Sehingga, dengan kata lain, penerapan SAK ETAP adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru di bidang akuntansi keuangan (dalam hal ini SAK ETAP) untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus perusahaan.

Pendidikan Pemilik UMKM

Holmes dan Nicholls dalam Grace (2004) mengemukakan bahwa pendidikan manajer atau pemilik mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. Program pendidikan merupakan alternatif kegiatan yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dirasa penting bagi perusahaan karena merupakan faktor fundamental yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan diberikannya pendidikan maka diharapkan setiap karyawan mampu memahami, menafsirkan dan mengembangkan pikirannya secara logis dan rasional, sehingga dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas demi peningkatan produktivitas kerja. Pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah sangatlah dominan dalam menjalankan usaha dalam perusahaan. Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan ini sangat mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi. Kemampuan dan keahlian pemilik atau manajer perusahaan sangat ditentukan oleh pendidikan formal yang telah ditempuh. Ini disebabkan karena perusahaan kecil dan menengah relatif tidak mampu menggunakan tenaga profesional akuntansi (akuntan) baik sebagai tenaga kerja perusahaan maupun sebagai pemberi jasa akuntansi. Tingkat pendidikan formal pemilik atau manajer ini sangat mempengaruhi penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dan manajemen. Tingkatan pendidikan formal yang rendah pemilik atau manajer akan rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkat pendidikan formal yang tinggi pemilik atau manajer. Ini disebabkan materi pengajaran akuntansi lebih tinggi diberikan di perguruan tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah.

Kemampuan dan keahlian manajer atau pemilik perusahaan mikro kecil dan menengah ditentukan dari pendidikan formal yang pernah ditempuh. Pemilik atau manajer perusahaan kecil dan menengah sangat dominan dalam menjalankan Perusahaan. Tingkatan pendidikan formal pemilik atau manajer perusahaan mikro kecil dan menengah sangat mempengaruhi kebutuhan informasi akuntansi keuangan dan manajemen Murniati (2002) seperti dikutip Sariningtyas dan Diah (2011).

Menurut Abrory (2004) seperti dikutip Sariningtyas dan Diah (2011) pendidikan manajer atau pemilik perusahaan akan diukur berdasarkan pendidikan formal yang pernah diikuti sehingga pengukurannya bersifat kontinyu. Pendidikan formal yang dimaksud adalah pendidikan yang diperoleh dibangku sekolah formal antara lain Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana dan Pascasarjana.

Tingkat pendidikan formal rendah (tingkat pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah umum) pemilik atau manajer akan rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi dibandingkan dengan tingkatan pendidikan formal yang tinggi (perguruan tinggi) pemilik atau manajer Abrory (2010) seperti dikutip Sariningtyas dan Diah (2011). Ini mungkin disebabkan karena materi pengajaran akuntansi lebih tinggi diberikan diperguruan tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah.

Dengan adanya tingkat pendidikan dan pemahaman yang lebih luas baik itu pemahaman soal penerapan SAK ETAP diharapkan pendidikan pemilik merupakan faktor terpenting dalam penerapan SAK ETAP karena banyak pikiran positif yang timbul tentang pentingnya penerapan SAK ETAP tersebut.

Pemahaman Teknologi Informasi

Pemahaman individu pada dasarnya merupakan pemahaman seluruh kepribadian dengan segala latar belakang dan interaksinya dengan lingkungannya Sariningtyas dan Diah (2011). Pemahaman pentingnya teknologi informasi bertujuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi, sebab informasi akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Semakin paham terhadap teknologi informasi maka akan semakin luas pandangan mereka terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di dalam kehidupan bisnis dan akan dapat mendorong percepatannya penyediaan informasi akuntansi yaitu berupa laporan keuangan bagi kalangan usaha mikro kecil dan menengah, maka peningkatan keterampilan dan pemahaman terhadap teknologi informasi terutama pada para petinggi di dalam suatu perusahaan menjadi persyaratan inti dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha Sariningtyas dan Diah (2011).

Pemahaman individu pada dasarnya merupakan pemahaman seluruh kepribadiannya dengan segala latar belakang dan interaksinya dengan lingkungannya Sariningtyas dan Diah (2011). Pemahaman pentingnya teknologi informasi bertujuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi, sebab informasi akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Semakin paham terhadap teknologi informasi maka akan semakin luas pandangan mereka terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi didalam kehidupan bisnis dan akan dapat mendorong percepatan penyediaan informasi akuntansi yaitu berupa laporan keuangan bagi kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka peningkatan ketrampilan dan pemahaman terhadap teknologi informasi terutama pada para petinggi didalam suatu perusahaan menjadi prasyarat inti dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha (Sariningtyas dan Diah, 2011).

Dengan adanya pemahaman teknologi informasi dalam hal ini teknologi informasi akuntansi diharapkan mampu mengenal lebih jauh lagi tentang pentingnya penerapan SAK ETAP tersebut. Karena UMKM di era sekarang sudah semakin banyak, tentu saja persaingan di dunia bisnis semakin kuat. Dengan adanya pemahaman tersebut diharapkan penerapan SAK ETAP harus diterapkan untuk menghadapi persaingan tersebut.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, dimana sebuah laporan keuangan baik itu perusahaan besar maupun yang kecil harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disebutkan bahwa suatu laporan keuangan haruslah dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan biaya dan manfaat. Dengan memenuhi karakteristik yang diatur dalam SAK ETAP diharapkan dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu usaha.

Dalam menyusun laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, dimana sebuah laporan keuangan baik itu perusahaan besar maupun yang kecil harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disebutkan bahwa suatu laporan keuangan haruslah dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan biaya dan manfaat. Dengan memenuhi karakteristik yang diatur dalam SAK ETAP dapat menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan UMKM itu sendiri.

Sosialisasi dan Pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait pembukuan bagi UMKM memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi dan pelatihan sebagai wujud pengembangan UMKM baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi swasta. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran pengusaha UMKM untuk lebih *aware* dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pembukuan bagi perkembangan usaha mereka.

Menurut Sudarmanto, mengutip Raymond Noe (2009) pelatihan merupakan usaha yang direncanakan oleh perusahaan (organisasi) untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan masih menurut Sudarmanto, mengutip Bernardin (2009) pelatihan (*training*) merupakan segala kegiatan untuk meningkatkan kinerja individu atau pegawai sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegangnya atau berhubungan dengan tugas saat ini.

Sedangkan Menurut Kaswan (2011) Pengembangan merupakan upaya memberikan kemampuan kepada karyawan yang diperlukan organisasi di masa yang akan datang. Sosialisasi SAK ETAP dimaksudkan sebagai suatu mekanisme penyampaian informasi mengenai SAK ETAP kepada pelaku UMKM sebagai target penggunaannya melalui berbagai pola dan bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun

tidak langsung yang bertujuan untuk membuat pelaku UMKM menjadi tahu bahkan memahami SAK ETAP. Sebagai kelanjutannya, diharapkan informasi mengenai standar ini mendorong implementasi SAK ETAP pada UMKM ke depannya dalam membantu pengembangan keterampilan manajemen keuangan UMKM serta mendukung pengambilan keputusan bagi UMKM.

Pada dasarnya kegiatan sosialisasi ialah bagian dari proses komunikasi informasi SAK ETAP dalam rangka peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang baku menurut standar yang berlaku serta peningkatan pengetahuan UMKM mengenai SAK ETAP. Agar penyampaian informasi berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, diperlukan pemahaman mengenai konsep informasi itu sendiri.

Sosialisasi SAK ETAP sebenarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan manajemen dan pengelolaan keuangan yang penting dalam rangka mendukung penerapan praktik akuntansi yang baku dengan cara memberikan pengetahuan mengenai SAK ETAP bagi pengusaha UMKM.

Sosialisasi yang dijalankan jelas sangat berpengaruh pada pemahaman dan kemauan pelaku UMKM dalam menerapkan SAK ETAP. Dalam proses sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai SAK ETAP memang diperlukan adanya kontinuitas dan konsistensi untuk mensosialisasikan SAK ETAP ke seluruh pihak terkait secara menyeluruh di seluruh Indonesia, baik dilakukan oleh IAI yang telah membuat standar tersebut maupun secara kerjasama dengan institusi lainnya. Dengan adanya input informasi yang berkesinambungan dari berbagai pihak yang diterima oleh pelaku UMKM, akan timbul motivasi dan keinginan untuk menerapkan SAK ETAP tersebut dengan segera secara tepat dan akurat. Jain (1999) dalam Era Astuti (2007) mengatakan pelatihan menghasilkan peningkatan profesional yang lebih jauh dalam manajemen.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono 2012:23) dikatakan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan uji Regresi Berganda. Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data primer yang diperoleh berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden, pelaku UMKM di wilayah kota Ambon. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai variabel-variabel penelitian ini, yaitu

pendidikan pemilik (X₁), pemahaman teknologi informasi (X₂), karakteristik kualitatif laporan keuangan (X₃), sosialisasi dan pelatihan (X₄), penerapan SAK ETAP (Y).

Definisi Operasional

Pendidikan Pemilik (X₁). Proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Indikator pada variabel ini adalah: pendidikan formal, pendidikan non formal, pengetahuan formal, dan pengetahuan non formal. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

Pemahaman Teknologi Informasi (X₂). Mampu dalam memahami informasi yang dihasilkan dari berbagai bidang, seperti dibidang teknologi ataupun bidang lainnya. Indikator pada variabel ini adalah: pemahaman teknologi informasi, dan keterampilan teknologi informasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

Karakteristik Laporan Keuangan (X₃). Informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Indikator pada variabel ini adalah: sederhana dan dapat dipahami, tepat waktu, dapat dipercaya, jujur, dapat dibandingkan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert

Sosialisasi dan Pelatihan (X₄). Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga, baik itu pemerintah maupun instansi swasta. Indikator pada variabel ini adalah: keikutsertaan responden dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan, pelatihan sesuai dengan bidang usaha, kesediaan, pentingnya pelatihan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

Penerapan SAK ETAP (Y). SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, salah satunya adalah UMKM. Dengan kata lain penerapan SAK ETAP adalah tindakan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru dibidang akuntansi keuangan (dalam hal ini adalah standar akuntansi ETAP) untuk satu kegunaan ataupun tujuan khusus perusahaan. Indikator pada variabel ini adalah: pemahaman SAK ETAP dan Proses pencatatan laporan keuangan UMKM. Variabel ini diukur juga menggunakan skala likert.

Sampel Penelitian

Selama periode pengamatan, terdapat sebanyak 263 UKM. Untuk kebutuhan penelitian dilakukan penarikan sampel yang dihitung dengan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2} = \frac{263}{1 + (263 \cdot (0,1)^2)} = 72$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

δ : Batas toleransi/ketidakteelitian (10%)

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 72 responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan kuesioner kepada pemilik usaha UMKM di kota Ambon. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak pihak tertentu dan dikerjakan dengan sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Kuesioner yaitu proses pengumpulan data dengan daftar pertanyaan maupun pernyataan yang disusun secara sistematis dan bersifat tertutup artinya responden memberikan jawaban berdasarkan pilihan jawaban yang telah disediakan (Indriyantoro dan Bambang 1999)

Metode Analisis

Uji Kualitas Data

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan instrument kuesioner. Oleh karena itu agar kualitas data dapat diketahui maka diperlukan adanya suatu pengujian. Pengujian yang dimaksud adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas pada kuesioner.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Uji validitas item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas metode korelasi *pearson*, yaitu mengorelasikan skor item dengan skor total item, kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan *r table* pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid, sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid (Priyatno, 2012).

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas teknik *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk dikatakan *reliable* apabila memiliki nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2016)

Uji Model Regresi Linier Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda digunakan dalam penelitian ini untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variable independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = penerapan SAK ETAP

X₁ = pendidikan pemilik

X₂ = pemahaman teknologi informasi

X₃ = karakteristik laporan keuangan

X₄ = sosialisasi dan pelatihan

β₀ = konstanta

β₁ = koefisien regresi X₁

β₂ = koefisien regresi X₂

β₃ = koefisien regresi X₃

β₄ = koefisien regresi X₄

ε = variabel pengganggu

HASIL

Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Sampel pada penelitian ini adalah UMKM di kota Ambon terbagi menjadi beberapa industri. Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tercatat 263 UMKM yang ada di kota Ambon yang terbagi pada beberapa industri, antara lain; industri pangan, industri sedang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronika, dan industri kerajinan). Sampel yang direncanakan 72 UKMK namun yang dapat digunakan untuk kepentingan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini sebanyak 61 responden (UMKM).

Kuesioner diedarkan pada 72 UMKM (21 pada industri pangan, enam pada industri sedang, enam pada industri kimia dan bahan bangunan, 16 pada industri logam dan elektronika, 23 pada industri kerajinan) di kota Ambon. Namun kuesioner yang kembali berjumlah 61 dari berbagai sektor industri sedangkan 11 kuesioner tidak kembali pada sektor kerajinan, sehingga 61 merupakan kuesioner yang dapat diolah.

Tabel 2
Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	72
Kuesioner yang kembali	61
Kuesioner yang tidak kembali	11
Kuesioner yang dapat diolah	61
Tingkat pengembalian kuesioner	89,36%

Sumber : data primer yang diolah (2017)

Karakteristik Responden

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di kota Ambon sebanyak 61 responden, gambaran mengenai responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3
Jenis kelamin responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	50	82%
Perempuan	11	18%
Jumlah	61	100%

Sumber : data yang diolah 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 dengan persentase 82% sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 11 dengan persentase 18%.

Tabel 4
Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
<SLTA/ sederajat	3	4.9%
SLTA/ sederajat	4	73.8%
S1	1	21.3%
Jum	6	100%

Sumber: data yang diolah 2017

Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan <SLTA/ sederajat berjumlah 3 orang dengan persentase 4.9%. sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat berjumlah 45 orang dengan nilai persentase 73.8%. dan responden yang dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 13 orang dengan nilai persentase 21.3%.

Tabel 5
Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan	Frekuensi	Presentase
Ekonomi	1	16.4%
Hukum	1	1.6%
Teknik	2	3.3%
Lainnya	4	78.7%
Jumlah	6	100%

Sumber: data yang diolah 2017

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah responden dengan latar belakang pendidikan ekonomi berjumlah 10 orang dengan persentase 16.4%. Sedangkan responden dengan latar belakang pendidikan hukum berjumlah 1 orang dengan nilai persentase 1.6%. Responden dengan latar belakang pendidikan teknik berjumlah 2 orang dengan nilai persentase 3.3%. dan responden dengan latar belakang pendidikan lainnya (diluar ekonomi, teknik, dan hukum) berjumlah 48 dengan nilai persentasi 78.7%.

Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian menyangkut pendidikan pemilik, pemahaman tentang teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, sosialisasi dan pelatihan, penerapan SAK ETAP.

Tabel 6
Skor Jawaban Responden (Pendidikan Pemilik)

Pernyataan X1 Pendidikan Pemilik	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
	STS		TS		CS		S		ST	
	Pendidikan Pemilik									
P1	-	-	-	-	3	5%	19	31.1%	39	63.9%
P2	-	-	-	-	2	3.4%	24	39.3%	35	57.3%
P3	-	-	-	-	3	5%	23	37.7%	35	57.3%
P4	-	-	-	-	3	5%	26	42.6%	32	52.4%

P5	-	-	-	-	3	5%	29	47.5%	29	47.5%
P6	-	-	-	-	3	5%	25	40.9%	33	54.1%
P7	-	-	1	1.7%	3	5%	25	40.9%	32	52.4%
P8	-	-	1	1.7%	2	3.4%	31	50.8%	27	44.1%
P9	-	-	-	-	3	5%	29	47.5%	29	47.5%
P10	-	-	1	1.7%	2	3.4%	29	47.5%	29	47.5%
P11	-	-	-	-	3	5%	26	42.6%	32	52.4%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X_1 (Pendidikan Pemilik) dengan jumlah sampel 61 responden dengan nilai rata rata yang menjawab sangat setuju adalah 52.4%, sedangkan responden yang menjawab setuju dengan nilai rata-rata adalah 42.5%, dengankan yang menjawab cukup setuju dengan nilai rata rata 4.5% dan yang menjawab tidak setuju dengan nilai rata rata 0.6%.

Tabel 7
Skor Jawaban Responden (Pemahaman Teknologi Informasi)

Pernyataan X2 Pemahaman Teknologi	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
	STS		TS		CS		S		ST	
	Pemahaman Teknologi Informasi									
P1	-	-	3	4.9%	20	32.8%	21	34.5%	17	27.8%
P2	1	1.8%	-	-	21	34.4%	25	40.9%	14	22.9%
P3	1	1.8%	-	-	20	32.8%	26	42.6%	14	22.9%
P4	-	-	2	3.4%	21	34.4%	29	47.5%	9	14.7%
P5	-	-	1	1.8%	19	31%	27	44.3%	14	22.9%
P6	1	1.8%	1	1.8%	17	27.8%	23	37.7%	19	31.1%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa variabel X_2 (pemahaman teknologi informasi) dengan jumlah sampel 61 responden dengan nilai rata rata yang menjawab sangat setuju adalah 23.7%, sedangkan responden yang menjawab setuju dengan nilai rata rata adalah 41.25%, sedangkan yang menjawab cukup setuju dengan nilai rata rata adalah 32.2%, sedangkan yang menjawab tidak setuju dengan nilai rata rata adalah 1.9%, dan yang menjawab sangat tidak setuju dengan nilai rata rata adalah 0.95%.

Tabel 8
Skor Jawaban Responden (Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan)

Pernyataan X3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
	STS		TS		CS		S		ST	
	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan									
P1	-	-	2	3.2%	19	31.2%	27	44.3%	13	21,3%
P2	-	-	2	3.2%	18	29.5%	28	46%	13	21,3%
P3	-	-	2	3.2%	18	29.5%	28	46%	13	21,3%
P4	-	-	2	3.2%	17	27.6%	26	43%	16	26.2%
P5	-	-	1	1.6%	17	27.6%	28	46%	15	25.5%
P6	-	-	1	1.6%	20	32.7%	22	36%	16	26.2%
P7	-	-	1	1.6%	20	32.7%	30	59.1%	10	16.3%
P8	-	-	1	1.6%	18	29.5%	25	41%	17	28%
P9	-	-	1	1.6%	17	27.6%	30	59.1%	13	21,3%
P10	-	-	1	1.6%	19	31.2%	27	44.3%	14	23%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X₃ (karakteristik kualitatif laporan keuangan) dengan jumlah sampel 61 responden dengan nilai rata rata yang menjawab sangat setuju adalah 23.01%, sedangkan yang menjawab setuju dengan nilai rata rata adalah 46.48%, kemudian yang menjawab cukup setuju dengan nilai rata rata adalah 27.15%, dan yang menjawab tidak setuju dengan nilai rata rata adalah 3.36%.

Tabel 4.8
Skor Jawaban Responden (Sosialisasi dan Pelatihan)

Pernyataan X4 Sosialisasi dan Pelatihan	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
	STS		TS		CS		S		ST	
	Sosialisasi dan Pelatihan									
P1	-	-	-	-	4	6.5%	13	21.3	44	72.1%
P2	-	-	-	-	5	8.1%	16	26.2	40	65.7%
P3	-	-	-	-	3	5%	21	34.4	37	60.6%
P4	-	-	-	-	4	6.5%	15	21.4	44	72.1%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel X₄ (Sosialisasi dan Pelatihan) dengan jumlah sampel 61 responden dengan nilai rata rata yang menjawab sangat setuju adalah 67.6%, sedangkan yang menjawab setuju dengan nilai rata rata adalah 25.8%, dan yang menjawab cukup setuju dengan nilai rata rata adalah 6.5%.

Tabel 9
Skor Jawaban Responden (Penerapan SAK ETAP)

Pernyataan Y Penerapan SAK ETAP	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%
	STB		KB		CB		B		SB	
	Penerapan SAK ETAP									
P1			1	1.6	23	37.7%	22	36.1%	15	24.6%
P2					19	31.1%	26	42.6%	16	26.2%
P3					16	26.4%	29	47.5%	16	26.2%
P4					18	29.5%	25	41%	18	29.5%
P5					21	34.4%	23	37.7%	17	27.9%
P6					21	34.4%	24	39.4%	16	26.2%
P7					21	34.4%	24	39.4%	16	26.2%
P8					19	31.1%	25	41%	17	27.9%

Sumber : data primer yang diolah 2017

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa variabel Y (Penerapan SAK ETAP) dengan jumlah sampel 61 responden dengan nilai rata rata yang menjawab sangat baik adalah 26.8%, sedangkan yang menjawab baik dengan nilai rata rata adalah 40.6%, dan yang menjawab cukup baik dengan nilai rata rata adalah 32.4%, dan yang menjawab kurang baik dengan nilai rata rata adalah 0.2%.

Uji validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas akan menguji masing masing *item* pernyataan setiap variabel penelitian, dimana untuk variabel *Pendidikan Pemilik* (X₁), Berjumlah 11 *item*, *Pemahaman Teknologi Informasi* (X₂), berjumlah 6 *item*, *Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan* (X₃) berjumlah 10 *item*, *Sosialisasi Dan Pelatihan* (X₄) berjumlah 4 *item*, dan variabel *Penerapan SAK ETAP* (Y) berjumlah 8 *item*. Jika *r* hitung (Untuk setiap butir dapat di lihat pada kolom item total statistik) lebih besar dari *r* tabel dan nilai *r* positif dengan taraf signifikan 5% = 0.252 maka item pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2006).

Tabel 10
Hasil Uji Validitas

Indikator	Pearson Korelasi	r Tabel	Keterangan
Pendidikan Pemilik (X1) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11	0.684 0.620 0.787 0.821 0.782 0.788 0.859 0.767 0.801 0.866 0.852	0.2521	Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Pemahaman Teknologi Informasi (X2) P1 P2 P3 P4 P5 P6	0.900 0.918 0.941 0.844 0.820 0.926	0.2521	Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (X3) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10	0.787 0.872 0.887 0.851 0.879 0.807 0.839 0.884 0.814 0.858	0.2521	Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sosialisasi dan pelatihan (X4) P1 P2 P3 P4	0.774 0.893 0.832 0.792	0.2521	Valid Valid Valid Valid

Penerapan SAK ETAP (Y)			
P1	0.867		Valid
P2	0.917		Valid
P3	0.879		Valid
P4	0.919		Valid
P5	0.929	0.2521	Valid
P6	0.923		Valid
P7	0.944		Valid
P8	0.948		Valid

Sumber : data primer yang diolah

Pada tabel diketahui bahwa uji validitas dimensi-dimensi pada variabel pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, sosialisasi dan pelatihan, dan penerapan SAK ETAP menunjukkan valid. Kevalidan ini ditunjukkan dengan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan pada tabel di atas menunjukkan semua pernyataan valid, dengan demikian dapat dipakai dalam penelitian.

Tabel 11
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Standarisasi	Keterangan
1	Pendidikan Pemilik	0.953		
2	Pemahaman teknologi informasi	0.966	0.6	Reliabel
3	Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	0.967		
4	Sosialisasi dan pelatihan	0.923		
5	Penerapan SAK ETAP	0.980		

Sumber: data primer yang diolah 2017

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel Pendidikan Pemilik memberikan nilai cronbach alpha sebesar $0.953 >$ dari nilai standarisasi 0,6. Kemudian pada variabel Pemahaman Teknologi Informasi mendapat nilai cronbach alpha sebesar $0.966 >$ dari nilai standarisasi sebesar 0,6. Variabel Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan mendapat nilai cronbach alpha sebesar $0.967 >$ dari nilai standarisasi sebesar 0,6. Variabel Sosialisasi dan Pelatihan mendapat nilai *cronbach alpha* sebesar $0.923 >$ dari nilai standarisasi sebesar 0.6. dan Penerapan SAK ETAP dapat dikatakan reliabel karena mempunyai nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai standarisasi 0.6.

Uji Regresi Berganda

Setelah variabel-variabel dalam penelitian ini telah dinyatakan lolos Uji Validitas, dan Reliabilitas, selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi berganda. Regresi linier

berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu Pendidikan Pemilik, Pemahaman Teknologi Informasi, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, Sosialisasi dan Pelatihan terhadap variabel dependen, yaitu Penerapan SAK ETAP. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Model Regresi
(Variabel Dependen: Penerapan SAK ETAP)

Nama Variabel	Simbol variabel	Koefisien regresi	t_{hitung}	Sig.
Pendidikan Pemilik	X_1	0,106	0,875	0.385
Pemahaman Teknologi Informasi	X_2	0,234	1.396	0.169
Karakteristik kualitatif LK	X_3	0,390	3,407	0,001
Sosialisasi dan Pelatihan	X_4	0,159	0.544	0,589
<i>Constanta</i> = 2,282 R dan R^2 = 0,636 dan 0,404 Adjusted R^2 = 0,362 F_{hitung} = 9,506 Sig F = 0.000				

Sumber: data primer, diolah.

Tabel hasil regresi memperlihatkan bahwa secara parsial semua variabel independen (pendidikan emilik, pemahaman terhadap teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, sosialisasi dan pelatihan) berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Penerapan SAK ETAP), dilihat dari nilai koefisien regresi yang positif. Namun tidak semuanya signifikan dimana hanya variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berpengaruh positif dan signifikan karena nilai probabilitas signifikansinya 0,001 lebih kecil dari alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05, sedangkan variabel independen lainnya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Karen nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari alpha yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05.

Walaupun secara parsial hanya satu variabel independen yang signifikan yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan, tetapi kenyataannya secara bersama-sama atau secara simultan/serempak dari uji simultan semua variabel independen signifikan dalam mempengaruhi penerapan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikansi F sebesar 0,000 di bawah alpha 0,05.

PEMBAHASAN

Hasil yang didapat dari penelitian ini dengan melibatkan 61 responden UMKM di kota Ambon yang terbagi menjadi beberapa industri. Dari hasil yang didapat melalui pengujian secara statistik 1). Pendidikan pemilik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. 2). Pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP 3). Karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. 4). Sosialisasi dan Pelatihan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Pembahasan dan hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

Pengaruh Pendidikan Pemilik Terhadap Penerapan SAK ETAP

Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, hasil Uji-t yang disajikan dalam tabel 12 menyajikan hasil uji statistik t variabel pendidikan pemilik memiliki nilai sig yang lebih besar dari alpha atau dapat dikaji pula dengan nilai t dimana $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.875 < 1.999$). Hal ini berarti bahwa pendidikan pemilik secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Hasil penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya (Nurita Budi Pertiwi dan Rustan Hanafi).

Holmes dan Nicholls dalam Grace (2004) mengemukakan bahwa pendidikan manajer atau pemilik mempengaruhi penyediaan dan penggunaan informasi akuntansi. Program pendidikan merupakan alternatif kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dirasa penting bagi perusahaan karena merupakan faktor fundamental yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dengan diberikannya pendidikan maka diharapkan setiap karyawan mampu memahami, menafsirkan dan mengembangkan pikirannya secara logis dan rasional, sehingga dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas demi peningkatan produktivitas kerja. Hasil di lapangan menemukan bahwa ada berpengaruh positif namun tidak signifikan pendidikan pemilik terhadap penerapan SAK ETAP dikarenakan rata rata responden mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dimana 73.8% adalah SLTA/ sederajat, 21.3% adalah S1, sedangkan 4.9% adalah <SLTA/ sederajat. Sehingga penerapan SAK ETAP masih sulit dilakukan karena mempunyai pemahaman yang masih terbatas.

Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi terhadap penerapan SAK ETAP

Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, hasil Uji-t yang disajikan dalam tabel 12 menyajikan menyajikan hasil uji statistik t variabel pemahaman teknologi

informasi memiliki nilai sig yang lebih besar dari alpha atau dapat dikaji pula dengan nilai hasil uji statistik t dimana nilai t hitung $< t$ tabel ($1.392 < 1.999$). Hal ini berarti bahwa pemahaman teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Hasil penelitian ini berbeda dengan peneliti sebelumnya (Nurita budi pertiwi dan Rustan Hanafi).

Pemahaman pentingnya teknologi informasi bertujuan untuk mengadopsi dan memanfaatkan suatu informasi akuntansi, sebab informasi akuntansi digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Semakin paham terhadap teknologi informasi maka akan semakin luas pandangan mereka terhadap berbagai bentuk penerapan teknologi di dalam kehidupan bisnis dan akan dapat mendorong percepatannya penyediaan informasi akuntansi yaitu berupa laporan keuangan bagi kalangan usaha mikro kecil dan menengah, maka peningkatan keterampilan dan pemahaman terhadap teknologi informasi terutama pada para petinggi di dalam suatu perusahaan menjadi persyaratan inti dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha Sariningtyas dan Diah (2011). Hasil di lapangan menemukan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP di karenakan tingkat pendidikan pemilik yang relatif rendah menyebabkan pemahaman teknologi itu juga rendah dan juga rata rata responden mempunyai usaha yang masih tergolong kecil sehingga menyebabkan pemahaman teknologi informasi tidak terlalu penting sehingga penerapan SAK ETAP masih sulit untuk diterapkan UMKM yang ada di kota Ambon.

Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan terhadap Penerapan SAK ETAP

Berdasarkan perhitungan statistic dengan SPSS, hasil Uji-t yang disajikan dalam tabel 12 menyajikan hasil uji statistik t variabel karakteristik kualitatif laporan keuangan memiliki nilai thitung $> t$ tabel ($3.407 > 1.999$). Hal ini berarti terdapat pengaruh positif karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap penerapan SAK ETAP. Selain itu juga uji probabilitas signifikansi dalam tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi $0.001 < 0.05(\alpha)$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP.

Dalam menyusun laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, dimana sebuah laporan keuangan baik itu perusahaan besar maupun yang kecil harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disebutkan bahwa suatu laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan biaya dan manfaat. Hasil penelitian di lapangan

menunjukkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK ETAP karena sebagian besar UMKM paham tentang pentingnya suatu laporan keuangan pada perusahaan.

Pengaruh Sosialisasi dan Pelatihan Terhadap Penerapan SAK ETAP

Berdasarkan perhitungan statistik dengan SPSS, hasil Uji-t yang disajikan dalam tabel 12 menyajikan hasil uji statistik variabel sosialisasi dan pelatihan memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.544 < 1.999$). Hal ini berarti terdapat pengaruh positif sosialisasi dan pelatihan terhadap penerapan SAK ETAP. Selain itu juga uji signifikansi konstanta dan variabel independen dalam tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi $0.589 > 0.05 (\alpha)$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sosialisasi dan pelatihan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Pada dasarnya kegiatan sosialisasi ialah bagian dari proses komunikasi informasi SAK ETAP dalam rangka peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang baku menurut standar yang berlaku serta peningkatan pengetahuan UMKM mengenai SAK ETAP. Agar penyampaian informasi berjalan dengan efektif dan tepat sasaran, diperlukan pemahaman mengenai konsep informasi itu sendiri.

Namun kenyataan yang ada di lapangan sosialisasi dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK ETAP dikarenakan karakter responden yang rata-rata tidak terlalu peduli dengan yang namanya sosialisasi dan pelatihan. Ada juga sosialisasi yang diadakan oleh pihak tertentu terhadap UMKM tetapi sosialisasi dan pelatihan dalam bentuk lain bukan soal penerapan SAK ETAP.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemilik UMKM berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP sehingga bagi para pemilik UMKM harus meningkatkan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal sehingga pemahaman tentang Penerapan SAK ETAP itu dipahami sehingga SAK ETAP itu sendiri bisa diterapkan di UMKM.

Kemudian pemahaman teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK ETAP sehingga bagi para pemilik UMKM harus lebih memperluas pengetahuan tentang pentingnya pemahaman teknologi informasi.

Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa karakteristik laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK ETAP. Semakin lengkap karakteristik kualitatif laporan keuangan UMKM maka penerapan SAK ETAP pada UMKM akan semakin baik. Sehingga UMKM itu sendiri terus berkembang.

Untuk sosialisasi dan pelatihan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerapan SAK ETAP sehingga diharapkan kepada pemilik UMKM untuk sadar betapa pentingnya sosialisasi dan pelatihan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Sampel penelitian ini berjumlah 61 yang terbagi pada beberapa industri yang ada di kota Ambon. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel sehingga bisa mewakili UMKM yang ada di kota Ambon.
2. Penelitian ini hanya menguji empat variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK ETAP yaitu pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan, serta sosialisasi dan pelatihan pada peneliti selanjutnya diharapkan mengganti atau menambah variabel independen lain seperti: persepsi usaha, umur usaha, skala usaha, pengetahuan akuntansi dan lain sebagainya.
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa indikator dan sub indikator sehingga kurang mengembangkan kuesioner. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indikator dan kuesioner untuk penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianti, Puspita. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*
- Ahalik. 2015. Panduan Praktis PSAK terkini berbasis IFRS terkait OCI VS SAK. ETAP. Jakarta : IAI
- Bank Indonesia. 2015. Profil Bisnis UMKM. Jakarta. LPPI
- Badudu dan zain, (1996:1487) penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tentang jumlah UMKM di Kota Ambon tahun 2016.
- Ferly, P., 2013. Peran Akuntansi Dalam Pemberdayaan. melalui <http://www.ferlyprogresif.blogspot.com/2013/peran-akuntansi-dalam-pemberdayaan.html> [25/09/2017].

- Firmansyah, Rakmad Ady. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. 2 No. 2
- Ghozali, Imam, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Holmes, Scoott and Des Nicholls. 1989. Modelling The Accounting Information Requirement of Small Business. *Accounting and Business Research*, Vol 19, no 74, pp. 143-150, 1989
- Idriyanto dan Bambang (1999). Metode Pembambilan Data
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta. IAI.
- Mahmud, Amir dan EA Soraya. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. *Accounting Analysis Journal* Vol. 5 No. 1
- M. Tohar, 2001, Membuka Usaha Kecil, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Pertiwi N, B dkk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik jurnal akuntansi Indonesia, vol, 5 no. 1 januari 2016 17-98
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, diunduh dari <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/12/PP-8.pdf>
- Pinasti, Margani. 2007. Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pangusaha Kecil atas Informasi akuntansi: Suatu Riset Eksperimen. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke X, Makassar.
- Price Waterhouse Coopers, (2009) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Rohman, Abdul, dkk. 2011. Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, vol XV: 327-343.
- Samryn (2011) Laporan posisi keuangan sebuah organisasi
- Said. 2009 dalam Rudiantoro dan Siregar 2012. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Sari, Diah Purnama. 2013. Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. Volume 4 Nomor 2 Halaman 165-329.
- Sariningtyas, P., dan T. W. Diah. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1:90-101.

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Bandung: Alfabeta
- Tarmizi, Rosmiaty dan Ni Luh Sartika Bugawanti. 2013. Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil dan Menengah terhadap Penggunaan SAK ETAP di Kota Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 4, No 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 4 Juli 2008.
- Wahdini dan Suhairi. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang
- Wahyuningsih, N. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Skripsi. Fakultas Ekonomi UNISSULA. Semarang
- Williams dan Sawyer. 2003 Teori Pemahaman Teknologi Informasi
- Wijaya, Stevanus Wisnu. 2006. Kajian Teoritis Technology Acceptance Model Sebagai Model Pendekatan Untuk Menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna Dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi. Yogyakarta.